



Persoalan Etika dan Legal dalam *Automated Consent*

Mohammad Alvi Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

E-mail: alvi.pratama@unpas.ac.id

Article Info

Article history:

Received August 18, 2025

Revised August 20, 2025

Accepted August 23, 2025

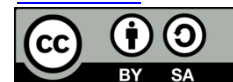
Keywords:

Automated Consent, Autonomy, Epistemic Justice, Consent Theory, AI Ethics

ABSTRACT

Consent through artificial intelligence (AI) systems presents fundamental challenges to traditional ethical frameworks regarding autonomy and informed consent. While automating consent technology promises to streamline decision-making processes, it raises critical questions about meaningful user control and epistemic justice. This article examines the philosophical and ethical implications of Automated Consent, particularly focusing on how AI-processed systems affect individual autonomy and create epistemic injustice in the digital space. This research employs a conceptual analysis approach, integrating philosophical analysis with empirical case studies from healthcare, data privacy, and AI ethics. The analysis examines traditional consent theory, automated consent systems, and their normative implications through the lens of metaethics and applied ethics. The analysis identifies three main challenges: (1) the degradation of individual control when AI systems make consent decisions on behalf of users, (2) contextual misalignment where AI fails to understand dynamic consent, and (3) the triggering of epistemic injustice through biased systems that systematically devalue/ignore the preferences of certain groups. While automated consent systems can enhance efficiency, they fundamentally challenge the moral foundations of consent by reducing users to passive subjects in decisions that should remain under their autonomous control. Developing ethical AI-driven consent systems requires addressing power imbalances and ensuring that both autonomy and epistemic justice are upheld.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 18, 2025

Revised August 20, 2025

Accepted August 23, 2025

Keywords:

Automated Consent, Autonomy, Keadilan Epistemik, Teori Consent, Etika AI

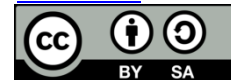
ABSTRAK

Automated Consent melalui sistem kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan fundamental terhadap *traditional ethical framework* mengenai *autonomy* dan *informed consent*. Meskipun teknologi *automating consent* menjanjikan untuk mengefisienkan proses pengambilan keputusan, teknologi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang kontrol pengguna yang bermakna dan keadilan epistemik. Artikel ini mengkaji implikasi filosofis dan etis dari *Automated Consent*, khususnya berfokus pada bagaimana sistem yang diproses AI mempengaruhi *autonomy* individu dan menciptakan ketidakadilan epistemik dalam ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konseptual, mengintegrasikan analisis filosofis dengan studi kasus empiris dari kesehatan, data privasi, dan etika AI. Analisis ini mengkaji teori *consent* tradisional, sistem *automated consent*, dan implikasi normatifnya melalui perspektif metaetika dan etika terapan. Analisis menemukan tiga tantangan utama: (1) degradasi kontrol individu ketika sistem AI membuat keputusan *consent* atas nama pengguna, (2) ketidakselarasan kontekstual di mana AI gagal memahami *consent* yang dinamis, dan



(3) pemicu ketidakadilan epistemik melalui sistem yang bias yang secara sistematis merendahkan/mengabaikan preferensi kelompok tertentu. Meskipun sistem *automated consent* dapat meningkatkan efisiensi, sistem ini secara fundamental menantang fondasi moral *consent* dengan mereduksi pengguna menjadi subjek pasif dalam keputusan yang seharusnya tetap di bawah kontrol otonom mereka. Pengembangan sistem *consent* yang digerakkan AI yang etis memerlukan penanganan ketidakseimbangan kekuasaan dan memastikan baik *Autonomy* maupun keadilan epistemik terpelihara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Mohammad Alvi Pratama

Universitas Pasundan

E-mail: alvi.pratama@unpas.ac.id

PENDAHULUAN

Consent telah lama diakui sebagai konsep etis fundamental dengan kekuatan transformatif moral dalam interaksi antarpersonal (Miller & Wertheimer, 2010). *Consent* yang valid membuat tindakan yang seharusnya tidak dapat diterima menjadi dapat diterima, secara fundamental mengubah hubungan antara pemberi *consent* dan penerima *consent* terkait tindakan yang didefinisikan dengan jelas, seperti penggunaan informasi pribadi. Tanpa *consent*, tindakan yang identik merupakan pelanggaran privasi. Untuk menjadi valid secara moral, *consent* harus melibatkan transfer hak dan kewajiban yang disengaja, komunikasi yang efektif, informasi yang memadai, dan kebebasan sejati untuk memilih atau menahan izin (DeGrazia & Millum, 2021; Dougherty, 2021).

Era digital telah memperumit mekanisme *consent* tradisional. *Consent* digital, yang biasanya diperoleh melalui *terms & conditions*, terutama berfungsi untuk menginformasikan hak penggunaan data perusahaan yang luas daripada memenuhi tujuan moral *consent*. Meskipun valid secara hukum, mekanisme tersebut sering dikritik sebagai tindakan prosedural yang kosong, hanya formalitas belaka (Lane et al., 2013). *Consent* di ruang digital / online biasanya ditandai melalui tombol "OK" pada banner *cookie*, *pop-up*, atau penggunaan situs yang berkelanjutan, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang efektivitas dalam mengubah hak atas data pribadi (Laine, 2023).

Solove (2013) mengidentifikasi tantangan utama dengan privasi digital berbasis *consent*: pengguna tidak dapat secara realistis membaca dan memahami setiap kebijakan privasi, kebijakan sering disusun dalam bahasa yang membingungkan, dan bahkan ketika dipahami, menilai risiko tetap tidak praktis. Model "*self-management privacy*" yang mengasumsikan pengguna dapat membuat pilihan yang telah diinformasikan, namun pada kenyataannya, ini tidak bermakna karena tidak ada menaruh perhatian pada permintaan *consent* tersebut (Lane et al., 2013).

Kemajuan kecerdasan buatan telah memperkenalkan paradigma baru: sistem *automated consent*. Teknologi ini merampingkan proses *consent* dengan memprediksi preferensi pengguna dan mengomunikasikannya ke AI (Andreotta & Lundgren, 2024). Namun, pendekatan ini sangat bergantung pada pengumpulan data pribadi yang ekstensif, menimbulkan



kekhawatiran etis tentang apakah *consent* yang dihasilkan mesin dapat memenuhi standar moral *consent*.

Automated Consent yang digerakkan AI merepresentasikan pergeseran dari model tradisional pengambilan keputusan individu ke pengganti algoritmik yang mengelola *consent* atas nama subjek data. Meskipun sistem ini mengurangi beban pengguna dengan mendelegasikan keputusan berbagi data ke perangkat lunak menggunakan aturan yang telah ditetapkan atau model pembelajaran mesin, sistem ini secara fundamental menantang gagasan tradisional tentang *consent* yang bermakna, sukarela, dan otonom (Jones et al., 2023).

Maka, Jika kita mendelegasikan keputusan *consent* kepada AI, apakah kita meningkatkan kontrol pengguna atas data pribadi, atau apakah kita berisiko menghilangkannya sama sekali? Bagaimana kita memastikan sistem ini menghormati *Autonomy* individu sambil menangani ketidakadilan epistemik yang mungkin timbul dari pengambilan keputusan algoritmik yang bias?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis multifaset yang menggabungkan analisis konseptual dengan pemeriksaan empiris aplikasi dunia nyata. Metodologi ini menempatkan penyelidikan dalam kerangka metaetika dan etika terapan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang tantangan *automated consent*.

Analisis dimulai dengan pemeriksaan konseptual yang mendalam tentang pemahaman tradisional *Autonomy* dan keadilan epistemik, mempertanyakan bagaimana konsep moral ini diinterpretasikan ulang ketika *consent* diotomatisasi. Pendekatan ini mengungkap fondasi normatif yang harus memandu pengembangan sistem otomatis dengan mengkaji dasar filosofis teori *consent* dan transformasinya dalam konteks digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup *Consent*

Teori *consent* tradisional mengikuti model "kunci dan gembok" di mana *consent* yang valid diperlukan dan cukup untuk transformasi moral. Namun, lingkungan digital telah mengubah dinamika ini secara fundamental. Mekanisme *consent* digital sering gagal memastikan pemahaman pengguna, menciptakan apa yang disebut para peneliti sebagai "tindakan prosedural kosong" atau "formalitas belaka" daripada transformasi moral yang bermakna (Toth, 2023).

Munculnya sistem *automated consent* menjadi evolusi lanjutan, bergeser dari manajemen *consent* individu ke pengganti algoritmik yang otomatis. Sistem ini bertujuan mengurangi beban kognitif sambil mempertahankan kontrol pengguna, namun menimbulkan pertanyaan fundamental tentang sifat pengambilan Keputusan yang otonom.

Prinsip *Autonomy* menegaskan bahwa individu harus mempertahankan kontrol yang bermakna atas keputusan mereka, termasuk *consent* (Laitinen & Sahlgren, 2021). Namun, sistem *automated consent* menciptakan skenario di mana AI menyimpulkan preferensi dan membuat keputusan *consent* atas nama pengguna. Ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang



diri kita sebagai agensi subjek data: ketika sistem AI membuat keputusan berdasarkan preferensi yang disimpulkan, apakah individu tetap menjadi penentu pilihan mereka sendiri?

Risiko muncul bahwa sistem otomatis mungkin memaksakan keputusan yang tidak sepenuhnya selaras dengan nilai pengguna, secara efektif mengurangi agensi individu menjadi pengamatan pasif daripada partisipasi aktif. Ini menjadi tantangan fundamental terhadap prinsip *Autonomy* yang mendasari teori *consent* etis.

Consent secara inheren dinamis dan kontekstual, sangat terikat pada situasi spesifik dan niat pribadi pengguna yang dinamis. Namun, sistem AI tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memahami atau beradaptasi dengan situasi ini. Masalah kritis muncul ketika AI mengasumsikan kontinuitas *consent* di berbagai konteks di mana niat pengguna mungkin telah berubah.

Harcarik et al. (2025) mengusulkan kerangka alternatif yang menekankan kemampuan untuk menyelaraskan nilai dengan tujuan pribadi, berfokus pada nilai, dari memiliki nilai, mengakses nilai seseorang, terlibat dalam penalaran praktis berdasarkan nilai tersebut, dan bertindak berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan. Perspektif ini menunjukkan *consent* yang valid memerlukan keterlibatan pribadi yang lebih dalam, memastikan keputusan benar-benar mencerminkan nilai dan tujuan individu, walaupun masih sulit untuk sistem AI di saat ini.

Persoalan Model dalam *Automated Consent*.

Penggunaan model *consent* biner dalam sistem yang digerakkan AI membuat *consent* sebagai pilihan terima-atau-tolak tanpa adanya diskusi dan komunikasi yang bermakna. Ini mengubah *consent* dari proses deliberatif menjadi formalitas prosedural, menghilangkan bobot etis yang seharusnya dibawa dalam transformasi moral.

Hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan epistemic dengan cara orang dirugikan dalam peran mereka sebagai pengambil pengetahuan (Hull, 2023). Ketidakadilan ini menurut Miranda Fricker terbagi dalam dua hal.

1. Ketidakadilan Testimonial

Ketika sistem AI dilatih pada data yang bias, mereka dapat secara sistematis merendahkan dan mengabaikan preferensi *consent* kelompok tertentu. Komunitas terpinggirkan / marginal mungkin menemukan preferensi mereka diabaikan atau ditolak karena sistem gagal mengenali mereka sebagai agen yang kredibel. Ini merepresentasikan ketidakadilan testimonial, di mana suara diabaikan berdasarkan identitas sosial daripada merit.

2. Ketidakadilan Hermeneutical

Ini terjadi ketika individu tidak memiliki sumber daya interpretatif untuk memahami sistem yang diberikan. Platform *consent* yang diproses AI sering mengaburkan metode pemrosesan data, meninggalkan pengguna tidak dapat memahami atau menantang keputusan yang dibuat atas nama mereka. Jika pengguna tidak dapat memahami syarat *consent* mereka sendiri, *consent* yang bermakna menjadi dipertanyakan.

Mekanisme *automated consent* sering melayani kepentingan pengembang, perusahaan, dan institusi daripada pengguna. Ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang siapa yang mengontrol kondisi *consent*. Ketika sistem terutama mencerminkan prioritas institusional, *consent* yang diinformasikan berisiko menjadi ilusi daripada bermakna.



Kerangka regulasi saat ini berjuang untuk menangani tantangan *automated consent* secara memadai. Meskipun GDPR menekankan kontrol dan transparansi pengguna, implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem yang digerakkan AI tetap bermasalah (Giannopoulou, 2020). Kesenjangan antara niat regulasi dan realitas teknologi menciptakan ruang di mana prinsip etis dapat dirusak meskipun kepatuhan hukum.

Kurangnya konsensus global tentang etika AI menyebabkan standar yang tidak konsisten di berbagai yurisdiksi dan industri (Kiani, 2022). Fragmentasi ini memperumit pengembangan pendekatan yang koheren terhadap *automated consent* yang menghormati baik prinsip *Autonomy* maupun keadilan epistemik. Meskipun tantangan yang diidentifikasi, penolakan total terhadap *automated consent* mungkin tidak praktis atau diinginkan. Sebaliknya, pengembangan kerangka etis memerlukan penanganan beberapa pertimbangan kunci:

1. Transparansi dan *Explainable*

Sistem harus memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana keputusan *consent* dibuat, memungkinkan pengguna untuk memahami dan menantang pilihan otomatis.

2. Mekanisme *Dynamic Consent*

Daripada pilihan statis dan biner, sistem harus memungkinkan manajemen *consent* berkelanjutan yang beradaptasi dengan preferensi dan konteks pengguna yang berubah.

3. Mitigasi Bias

Proses pengembangan harus secara aktif menangani bias potensial dalam data pelatihan dan pengambilan keputusan algoritmik untuk mencegah diskriminasi sistematis terhadap kelompok terpinggirkan.

4. Kontekstualitas

Sistem harus dirancang untuk mengenali dan beradaptasi dengan konteks yang berbeda daripada mengasumsikan transferabilitas *consent* di berbagai situasi.

KESIMPULAN

Automated Consent melalui sistem AI menghadirkan tantangan fundamental terhadap kerangka etis yang mapan sambil menawarkan manfaat potensial untuk mengurangi beban kognitif dan merampingkan interaksi digital. Analisis ini mengungkapkan bahwa meskipun teknologi *automated consent* dapat meningkatkan efisiensi, mereka berisiko merusak fondasi moral yang membuat *consent* bermakna secara etis.

Tiga kekhawatiran utama muncul dari pemeriksaan ini: degradasi kontrol individu ketika sistem AI mengambil alih otoritas pengambilan keputusan, ketidakselarasan kontekstual di mana sistem otomatis gagal memahami situasional *consentee*, dan peningkatan ketidakadilan epistemik melalui sistem yang bias yang secara sistematis merugikan kelompok tertentu.

Jalan ke depan memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara kemampuan teknologi dan tanggung jawab etis. Sistem *automated consent* harus dikembangkan dengan perhatian eksplisit untuk menghormati *autonomy* pengguna dan menangani kekhawatiran keadilan epistemik. Ini memerlukan sistem yang transparan dan *explainable* yang mempertahankan



kontrol pengguna yang bermakna sambil secara aktif mengurangi bias dan ketidakseimbangan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreotta, A. J., & Lundgren, B. (2024). Automated informed consent. *Big Data and Society*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/20539517241289439>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- DeGrazia, D., & Millum, J. (2021). *A theory of bioethics*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/9781316515839>
- Demaree-Cotton, J. (2021). *Philosophy, psychology, and the ethics of consent* [Disertasi doktoral, Yale University]. https://elischolar.library.yale.edu/gsas_dissertations
- Dougherty, T. (2021). *The scope of consent*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192894793.001.0001>
- Floridi, L. (2023). The ethics of artificial intelligence: Principles, challenges, and opportunities. *Oxford Review of Economic Policy*, 39(4), 621-632.
- Giannopoulou, A. (2020). Algorithmic systems: The consent is in the detail? *Internet Policy Review*, 9(1), 1-19. <https://doi.org/10.14763/2020.1.1452>
- Harcarik, L., Kim, S. Y. H., & Millum, J. (2025). The ability to value: An additional criterion for decision-making capacity. *Bioethics*, 39(3), 288-295. <https://doi.org/10.1111/bioe.13387>
- Hull, G. (2023). Dirty data labeled dirt cheap: Epistemic injustice in machine learning systems. *Ethics and Information Technology*, 25(3), Article 38. <https://doi.org/10.1007/s10676-023-09704-7>
- Jones, M. L., Kaufman, E., & Edenberg, E. (2023). AI and the ethics of automating consent. *IEEE Security & Privacy*, 21(3), 42-49. <https://www.computer.org/security>
- Jongepier, F., & Keymolen, E. (2022). Explanation and agency: Exploring the normative-epistemic landscape of the "right to explanation." *Ethics and Information Technology*, 24(4), Article 54. <https://doi.org/10.1007/s10676-022-09654-x>
- Kiani, F. (2022). Global harmonization of AI regulation: Addressing cross-border challenges in ethical standards, accountability, and liability. *Legal Studies in Digital Age*, 1(1), 15-32.



- Laine, J. (2023). There is no decision: Design of cookie consent banner and its effect on user consent [Tesis master]. Aalto University.
- Laitinen, A., & Sahlgren, O. (2021). AI systems and respect for human autonomy. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 4, Article 705164. <https://doi.org/10.3389/frai.2021.705164>
- Lane, J., Stodden, V., Bender, S., & Nissenbaum, H. (Eds.). (2013). *Privacy, big data, and the public good: Frameworks for engagement*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107590205>
- Miller, F., & Wertheimer, A. (2010). *The ethics of consent: Theory and practice*. Oxford University Press.
- Millum, J., & Bromwich, D. (2018). Understanding, communication, and consent. *Ergo, an Open Access Journal of Philosophy*, 5(2), 45-77. <https://doi.org/10.3998/ergo.12405314.0005.002>
- Pethig, F., & Kroenung, J. (2023). Biased humans, (un)biased algorithms? *Journal of Business Ethics*, 183(3), 637-652. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05071-8>
- Sloan, R. H., & Warner, R. (2014). Beyond notice and choice: Privacy, norms, and consent. *Journal of High Technology Law*, 14(2), 370-430. <http://ssrn.com/abstract=2239099>
- Solove, D. J. (2013). Introduction: Privacy self-management and the consent dilemma. *Harvard Law Review*, 126(7), 1880-1903.
- Toth, M. (2023). *Consent on the web: A transdisciplinary analysis* [Disertasi doctoral]. Université de Toulouse. <https://theses.hal.science/tel-04259483v1>
- Tschider, C. A. (2020). Meaningful choice: A history of consent and alternatives to the consent myth. *North Carolina Journal of Law & Technology*, 21(4), 185-242. <https://scholarship.law.unc.edu/ncjolt>
- Woolley, J. P. (2019). Trust and justice in big data analytics: Bringing the philosophical literature on trust to bear on the ethics of consent. *Philosophy and Technology*, 32(1), 111-134. <https://doi.org/10.1007/s13347-017-0288-9>